

KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN (Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013)

Mutiara Aliefty Octavina, Suryadi, Stefanus Pani Rengu

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: mutiaraalieftyoctavina@yahoo.com

Abstract: Regent Leadership in Increase Development. *This research was conducted to performan exposure related to leadership styles about his ability to lead, on the other hand there are people who have excess capacity to lead. This when the emergence of the need for leaders and leadership. The problem of this research is how Regional Head Bangkalan leadership in promoting development and the factors that influence whether Regional Head Bangkalan leadership in promoting development. This research used qualitative approach, where qualitative research is are search procedure that produces descriptive. This research results conclusions that in the decision-making process, Regent done it in a transparent manner to meet the aspirations of all forms submitted by the community. Indetermining of Regents policy is always open to criticism, and also gives awards to those who have a good performance. Based on the results of the study also showed in the conclusion that the Regents adopts a democratic leadership. It can be seen from the decision-making procedure, determination of activity, assignment, awards and criticism that involves the community and subordinates.*

Keywords: leadership, development

Abstrak: Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan suatu pemaparan terkait dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan, dalam hal ini mengenai kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Sebagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepemimpinan Bupati Bangkalan dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, Bupati selalu melakukan dengan cara yang transparan, sehingga dapat memenuhi segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam penetapan kebijakan, Bupati selalu terbuka terhadap kritik dan saran, selain itu juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki prestasi kerja yang baik. Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa dalam mengambil kesimpulan, Bupati Bangkalan menganut sistem kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengambilan keputusan, penetapan kegiatan atau tugas, pemberian tugas atau penugasan, pemberian penghargaan dan kritik yang melibatkan masyarakat dan jajaran di bawahnya.

Kata kunci: kepemimpinan, pembangunan

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi

perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan proses interaksi antara pemimpin dengan pegawainya untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana pimpinan

mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat.

Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan diantara orang-orang dalam kelompok, maka orang-orang mencari cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam proses pembaginan tugas dan wewenang secara tepat secara langsung akan membantu proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pembangunan daerah di Bangkalan selama sepuluh tahun ini banyak mengalami kemajuan. Pembangunan tersebut bersifat fisik dan non fisik. Beberapa pembangunan fisik tersebut adalah semakin indahnya tata kota, pembangunan pasar modern atau mall, revitalisasi pasar yang tadinya ada di tengah kota dipindah ke tempat yang lebih strategis sehingga tidak membuat kemacetan, perbaikan stadion bertaraf nasional, gedung serbaguna, pembangunan pendopo agung II, GOR, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik adalah peningkatan pembangunan disektor pariwisata dengan memanfaatkan peran duta wisata dan pelestarian budaya asli Madura, serta pembangunan sekolah seperti penambahan sekolah di Kabupaten Bangkalan.

Pembangunan daerah di Bangkalan tidak lepas dari sosok pemimpin daerahnya, dimana pemimpin daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan pembangunan daerahnya. Pentingnya peran pemimpin daerah berawal dari adanya desentralisasi di mana desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pusat ke daerah. Berawal dari itulah peran pemimpin daerah menjadi sangat penting.

Jika dilihat dari majunya pembangunan daerah di Bangkalan, pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dalam desentralisasi. Dibandingkan dengan tiga kabupaten lain yang ada di Madura, Bangkalan dapat dikatakan lebih maju dalam hal pembangunan fisik. Apabila ditinjau dari segi kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Bangkalan, kepemimpinan yang sekarang dengan kepemimpinan sebelumnya nampak cukup terlihat jauh berbeda dalam hal pembangunan fisiknya. Pemimpin yang sekarang cukup memberikan fakta jika dilihat dalam hal pembangunan fisiknya mampu mencapai kemajuan dan keberhasilan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemimpin daerah sebagai pejabat dengan wewenang tertinggi dalam pemerintahan daerah.

Menariknya, kepala daerah di Bangkalan dalam dua periode terakhir ini berasal dari elit sosio kultural. Konstruksi sosial masyarakat selama ini mengidentikkan sosok elit sosio kultural sebagai sosok dengan pemikiran-pemikiran yang masih tradisional. Dengan begitu fakta kemajuan pembangunan yang ada di Bangkalan mematahkan konstruksi sosial masyarakat tersebut.

Tinjauan Pustaka

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Pendapat *A.Dunsire* yang dikutip oleh *Donovan dan Jackson (1991, h.9)* menunjukkan variasi batasan tentang administrasi. Administrasi, menurut pendapat *A.Dunsire*, dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, Kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

2. Pengertian Administrasi Publik

Menurut *Chandler dan Plano (1988, h.29-30)*, Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik serta administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

B. Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Gibson dkk (1997, h.5), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Definisi *Gibson* mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan.

2. Syarat-syarat Kepemimpinan

Kartono dalam Pasolong (2008, h.114-115), mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) **Kekuasaan**, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) **Kelebihan**, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) **Kemampuan**, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

3. Peran Pemimpin Birokrasi

Pasolong (2010, h.32), peran pemimpin birokrasi yang mutlak dilakukan adalah (1) **Merencanakan**, yaitu suatu hal yang sangat *urgent* dari seluruh kegiatan. Oleh karena perencanaan merupakan sarana bagi pemimpin birokrasi untuk menentukan ke arah mana birokrasi akan dibawa, sulit

diharapkan hasil yang baik jika perencanaan dalam birokrasi kurang baik, sekalipun pelaksanaan dilakukan secara baik. (2) **Pengorganisasian**, yaitu suatu konsep yang memiliki makna yang cukup luas karena menyangkut dua hal yaitu: (a) Struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Secara umum yang mengatur struktur birokrasi adalah pemimpin birokratis tingkat atas (eksekutif). Akan tetapi yang dibahas adalah unit birokrasi dalam kaitannya dengan sekelompok orang yang mempersatukan dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat mereka laksanakan sendiri, (b) Penempatan pegawai dalam birokrasi. Hal ini pemimpin birokrasi harus mengetahui lebih dulu tentang karakteristik orang yang akan ditempatkan sebaik mungkin, guna mendapatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat sekaligus menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat pada situasi bawahan yang tepat. (3) **Mengawasi**, yaitu kegiatan pemimpin yang sangat menentukan, karena dengan mengawasi akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada dasarnya pemimpin birokrasi mengawasi tiga hal yaitu uang, bahan, dan pegawai. Langkah yang diperlukan dalam mengawasi adalah menentukan standar, ukuran hasil atas dasar standar dan melakukan perbaikan jika diperlukan, dan (4) **Mengevaluasi**, yaitu pemimpin birokrasi berperan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan para pegawai, apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan secara efisien dan efektif, ataukah pelaksanaan pekerjaan justru terjadi inefisiensi. Hasil evaluasi inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika ditemukan ada kendala-kendala dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

4. Gaya Kepemimpinan

Stoner dalam Pasolong (2010, h.37), mengatakan bahwa gaya kepemimpinan (*leadership style*) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja.

5. Beberapa Gaya/Model

Kepemimpinan

Gaya Kepemimpinan Lippit and White

- a. **Gaya Otokratis**, yaitu gaya kepemimpinan otoritarian dapat pula disebut tukang cerita. Pemimpin otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan.
- b. **Gaya Demokratik**, yaitu gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pendekatan tidak berarti para pemimpin tidak membuat keputusan, tetapi justru seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran organisasi sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para anggotanya, *Sudriamunawar dalam Pasolong (2011, h.47)*
- c. **Gaya Laissez Faire**, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan organisasi.

C. Pembangunan Daerah

1. Teori Desentralisasi

Alderfer dalam Muluk (2009, h.11), mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah.

2. Pengertian Pembangunan

Siagian dalam Dedy Supriady (2004, h.4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan. Dengan situs penelitian Kantor BAPPEDA, Kantor PU.CIPTA KARYA, Sekda, LSM, Kepala Desa, Kontraktor. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian yaitu: fokus pertama yaitu gaya kepemimpinan bupati di Kabupaten Bangkalan, meliputi: (a) Pengambilan keputusan, (b) Penetapan Kegiatan atau Tugas, (c) Pemberian Tugas atau Penugasan, (d) Pemberian Penghargaan dan Kritik. Fokus kedua yaitu: (a) Latar Belakang Kehidupan, (b) Pengalaman dalam Berorganisasi

Pembahasan

1. Gaya Kepemimpinan Bupati dalam Memimpin Kabupaten Bangkalan

Kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan juga melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. Kepala Daerah (RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd) dalam memimpin Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan hasil yang konkrit terutama di bidang pembangunan infras-

truktur. Dalam proses pengambilan keputusan Bapak Bupati Bangkalan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Apabila dikaitkan dengan penetapan kegiatan/tugas maka dapat diketahui bahwa Bapak Bupati merupakan pemimpin yang tegas dalam pengambilan keputusan. Bentuk ketegasan tersebut ditunjukkan yaitu ketika diadakan rapat koordinasi bidang pembangunan fisik dengan SKPD terkait.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan menunjukkan bahwa bapak bupati selalu berupaya untuk memberikan jaminan atas pembangunan infrastruktur yang benar-benar mampu memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat.

Sejak periode pertama kepemimpinannya (2003-2008) RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd selaku Bupati Bangkalan, jelas sekali terlihat bahwa perkembangan pembangunan di Bangkalan mengalami kemajuan signifikan. Indikatornya tidak hanya dapat dilihat dalam perspektif angka-angka statistik yang bersifat kuantitatif, namun juga dinamika politik kemasyarakatan yang cenderung semakin kondusif, serta pembangunan disegala bidang yang secara kualitatif dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal yang sama terjadi pada kepemimpinannya untuk kali yang kedua (2008-2013). Pada periode kali kedua ini capaian pembangunan di Bangkalan semakin meningkat, sehubungan dengan telah beroperasinya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, di mana pintu gerbangnya berada di Kabupaten Bangkalan.

Kebijakan yang dilakukan bapak bupati dalam pengambilan keputusan, penetapan kegiatan/tugas, pemberian tugas/penugasan dan pemberian penghargaan dan kritik maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Bupati RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd adalah gaya kepemimpinan demokratis. Dalam kondisi tertentu gaya kepemimpinan yang ditetapkan oleh bupati yaitu bersifat otoriter, namun demikian masih dalam koridor demokratis dimana

proses penerapan otoriter melalui berbagai tahapan sehingga jaminan kepentingan umum menjadi target utama yang harus dipenuhi.

Menurut (Robbins dan Coulter, 2002), gaya kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih para pegawai. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis Sukanto (1987, h.196-198): 1) Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. 3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Bupati Bangkalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd pada dasarnya dapat ditentukan oleh dua faktor, dimana kedua faktor tersebut terkait secara langsung dengan latar belakang kehidupan dan pengalaman dalam berorganisasi. Apabila dikaitkan dengan latar belakang kehidupan bapak bupati menunjukkan bahwa beliau sebelumnya menjadi tokoh sentral di Bangkalan.

Terkait dengan pengalaman dalam berorganisasi yang dimiliki oleh RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd dapat diketahui bahwa bapak bupati memiliki beragam jenis pekerjaan di mana dalam proses pengelolannya membutuhkan berbagai keuletan dalam proses pengelolannya. Dalam hal bergaulan beliau juga memiliki pergaulan yang luas sehingga mampu melakukan proses interaksi yang cukup intens dilakukan. Dalam bidang organisasi RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd mulai

nampak ketika berkecimpung di partai politik.

Nightingale dan Schult dalam Pasolong (2008, h.115), mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, yaitu: (1) Kemandirian berhasrat untuk memajukan diri sendiri (*individualism*) (2) Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik kepada manusia dan benda-benda (3) Multiterampil atau memiliki kepandaian yang beraneka ragam (4) Memiliki rasa humor, suka berelawan, antusiasme yang tinggi (5) Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna (6) mudah menyesuaikan diri, adaptasi tinggi (7) Sabar tapi tidak berarti diam atau berhenti (8) Waspada, peka, jujur, optimis, gigih, ulet dan realistis (9) Komunikatif serta pandai berbicara atau berpidato (10) Berjiwa wiraswasta (11) Sehat jasmani, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat serta berani mengambil resiko (12) Tajam firasatnya, adil pertimbangannya (13) Berpengetahuan yang luas dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuannya (14) Memiliki motivasi yang tinggi, sadar akan target yang harus dicapainya dengan idealismnya yang tinggi (15) Punya imajinasi dan sinerjik.

Dari teori tersebut yang menyebutkan tentang syarat-syarat kepemimpinan. RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd telah memilikinya. Salah satu faktor dapat dilihat dari latar belakang beliau yang berasal dari kalangan pesantren, latar belakang tersebut tidak menghambat beliau dalam mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Pribadinya yang pandai bergaul, fleksibel dan cepat beradaptasi membuat dirinya mudah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang status dan stratifikasi sosial. Pada masa kepemimpinan RKH. Fuad Amin Imron, S.Pd beliau mendapatkan banyak prestasi dan penghargaan di berbagai bidang, karena latar belakang beliau selain berasal dari kalangan pesantren, beliau juga merupakan pengusaha yang sukses di bidang bangunan, konon beliau juga pernah bekerja di luar negeri dan menjadi pengawas bangunan di salah satu negeri Jiran, segala macam pekerjaan dijalannya hingga bertahun-

tahun, itulah sebabnya beliau banyak paham tentang dunia bangunan dan konstruksi.

Berkat keuletannya menekuni dunia bisnis, beliau menjadi sesosok pemuda yang sukses secara ekonomi, dibandingkan dengan pemuda seusianya di Bangkalan. Karena begitu luas pergaulan yang dimilikinya dengan proses interaksi yang cukup intens dilakukan, instingnya menjadi terlatih, ia memiliki kemampuan bathiniah untuk bisa melihat kegelisahan seseorang yang bisa dihadapinya. Hal tersebut bisa dilihat pada hasil dokumentasi pencapaian prestasi dan penghargaan yang berupa file dokumen yang telah diolah oleh penulis. Tak luput juga, beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya. Selain memiliki rasa tanggung jawab yang besar beliau mempunyai hasrat untuk unggul, hal ini terbukti pada pencapaian hasil pembangunan Daerah pada masa kepemimpinannya. Dalam setiap keputusan yang diambil, beliau selalu menginginkan yang terbaik bagi masyarakat dan Daerahnya, tentunya karena beliau memiliki jiwa perfeksionis dan motivasi tinggi dalam target yang harus dicapainya.

Menurut *Kartono dalam Pasolong, (2008, h.114-115)*, mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa RKH Fuad Amin Imron sebagai Bupati Bangkalan merupakan sosok pemimpin yang mempunyai tipikal yang unik. Hal itu

didasarkan bahwa beliau yang berasal dari kalangan ulama mampu membawa Bangkalan ke arah yang lebih baik. Adapun kesimpulan berdasarkan fokus yang penulis dapatkan antara lain:

1. Gaya Kepemimpinan Bupati dalam Memimpin Kabupaten Bangkalan

a. Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan Bapak Bupati selalu melakukan secara transparan sehingga dapat memenuhi segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kebijakan atas pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan atas kejahteraan kepada masyarakat.

b. Penetapan Kegiatan/Tugas

Bentuk-bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Bapak Bupati terkait dengan kebijakan pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan bahwa selama ini dalam penetapan kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan atau proyek selalu memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang terkait sehingga dalam proses pembangunan tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan.

c. Pemberian Tugas/Penugasan

Dalam proses pengambilan keputusan yang akan ditetapkan kebijakan bapak bupati selalu merujuk dari hasil pembagian tugas atau pekerjaan sehingga dapat memberikan jaminan bahwa pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga aktivitas yang dilakukan merupakan hasil kerja yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

d. Pemberian Penghargaan dan Kritik

Dalam penetapan kebijakan bapak Bupati selalu terbuka terhadap kritik, selain itu juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki prestasi kerja yang baik sehingga secara langsung dapat memberikan dukungan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bapak bupati selaku pimpinan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penulis mengambil kesim-

pulan bahwa RKH Fuad Amin menganut sistem kepemimpinan demokratis. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dan jajaran di bawahnya. Dalam pelaksanaan kepemimpinannya, beliau menggunakan metode *bottom up*, dimana hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mengakomodir segala kebutuhan masyarakat. Beliau juga merupakan sosok yang egaliter, yang mampu memutus gap antara penguasa dan rakyat. Penyatuan dua kutub yang berbeda ini (penguasa dan rakyat) menciptakan sinergi yang baik dan juga mampu menciptakan rasa tanggung jawab dalam membangun Bangkalan menuju arah yang lebih baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Bupati Bangkalan

Gaya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Bupati Bangkalan merupakan suatu gaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya Bangkalan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerapan gaya itu. Dari penelitian yang dilakukan, salah satu faktornya adalah ketokohan dari RKH Fuad Amin sendiri yang merupakan seorang ulama kharismatik keturunan dari Syaikhona Kholil. Sebenarnya hal itu membuat beliau mempunyai dominansi yang besar dalam penentuan setiap kebijakan. Akan tetapi, sebagai seorang ulama yang lebih mementingkan kemaslahatan umat, beliau mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan Karena.nantinya segala kebijakan yang dikeluarkan akan mempunyai efek pada masyarakat.

Pengalaman berorganisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dari RKH Fuad Amin, dimana beliau memiliki pengalaman organisasi yang cukup dan karier politik yaitu terpilih menjadi anggota DPR-RI pada pemilu 1999 dan menjadi Bupati Bangkalan sejak 2003.

Daftar Pustaka

- Chandler, R.C. & J.P. Petter. (1988) **The Public administration Dictionary**. Second Edition.
- Donovan, F. dan A.C. Jackson. (1991) **Managing human services organizations**. New York, Prentice Hall.
- Gibson, Ivancevich Donnelly. (1997) **Organisasi: Perilaku Struktur Proses**. Jilid II. Jakarta, Binarupa Aksara.
- Muluk, Khairul M.R. (2009) **Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah**. Surabaya, ITS Press.
- Pasolong, Harbani, (2008) **Teori Administrasi Publik**, Bandung, Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, (2010) **Kepemimpinan Birokrasi**. Bandung, Alfabeta.
- Robbins, S.P. (2006) **Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi**. Alih Bahasa: Yusuf Udaya. Jakarta, Arcan.